

**PENGARUH PERANGKAT DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS KECAMATAN
TELLULIMPOE KABUPATEN
SINJAI)**

SKRIPSI

Oleh :

**DESI HARIANTI
NIM 105730518815**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

**PENGARUH PERANGKAT DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA (STUDI KASUS KECAMATAN
TELLULIMPOE KABUPATEN
SINJAI)**

SKRIPSI

Oleh :

**DESI HARIANTI
NIM 105730518815**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2019

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, saudara-saudaraku serta keluarga dan sahabat yang selalu mendoakanku dan menyemangtiku dalam menyelesaikan karya ilmiah ini





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 886 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : 'Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai)'

Nama Mahasiswa : Desi Harianti
No Stambuk/NIM : 105730518815
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 24 Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Pembimbing I,

Menyetujui,

Pembimbing II,

Dr. Agus Salim HR, SE., MM.
NIDN: 0911115703

Muttiarni, SE, M.Si
NIDN: 0930087603

Mengetahui,

Asisten dekan Akuntansi

Dr. Ismail Baidillah, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama Desi Harianti NIM : 105730518815, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 130/ Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 24 Agustus 2019 M sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar 23 Dzulhijjah 1440 H
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE, MM
(Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM
 2. Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si Ak. CA. CSP
 3. Abd. Salam, HB, SE., M.Si Ak. CA. CSP
 4. Faidhul Adzim, SE., M.Si



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7. Tel. (0411) 888 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Hanarti

Stambuk : 105730518815

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Telluimpo'e Kabupaten Sinjai)"

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang membuat Pernyataan,

METERAI TEMPAK
12857ADP00462340
5000
PENGESAHAN
Desi Hanarti

Diketahui Oleh :

Dekan,
Fakultas Ekonomi & Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua,
Jurusan Akuntansi



Ismail Basuleng, SE.,MM
NBM: 903078

Dr. Ismail Badollahi, SE.M.SI.Ak.CA.CSP
NBM: 1073428

ABSTRAK

DesiHarianti, Tahun 2019. Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (studi kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai)
Pembimbing: bapak Agus Salim HR dan Ibu Muttiarni)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perangkat Desa terhadap akuntabilita pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai). Sampel dalam penelitian ini sebanyak 61 responden untuk pengisian angket. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik analisi data menggunakan uji regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

Kata kunci: Perangkat desa, akuntabilitas pengelolaan dana desa



ABSTRACT

DesiHarianti, year 2019. *The influence of the village apparatus on the accountability of fillage fund management (casestudy of Tellulimpoe District, Sinjai District)* Guide: Mr. AgusSalim HR, and Mrs. Muttiarni

This study aims to determine the influence of fillage fund management (case study of the Tellulimpoe District Sinjai District). Thus the number of samples in this study werw 61 respondents for filling out the questionnaire. The analytical method used is quantitative analysis with an associative approach. Data analysis techniques using simple regression tests. The results of this study indicate that village officials have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in the Tellulimpoe district of Sinjai District.

Key words: Village apparatus, village fund management accountability



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pujisyukurpenulispanjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkatrahmat dan hidayah Nya sehinggapenulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai)” dapat terselesaikan.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Secara khusus ucapan sayang dan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis bapak Asri dan ibu Irma yang tak pernah berhenti memberikan harapan, restu, semangat, cinta dan kasih sayang yang begitu tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang selalu mendukung dan memberi perhatian penuh dan selalu memberikan semangat hingga penulis bisa sampai ditahap ini.

Uapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis sejak awal proses penyusunan skripsi dan mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong SE, MM selaku Dekan FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si.Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., MM selaku pembimbing pertama dan Ibu Muttiarni SE,M.Si selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini
5. Bapak dan Ibu dosen, serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak membantu dan memberikan ilmu yang tak terhingga kepada penulis selama menempuh studi
6. Sahabatku Sudarmi, Sulfiana, Achmad Bashit, Nur. Muh Asriadi yang selalu membantu dan setia menemani dalam menyelesaikan tugas akhir ini, serta sahabat seperjuangan naik turun tangga Merianti, Asti Nilawati H, Resky Wahyuni, Nurhidayah dan teman-teman seperjuangan AK. 15A

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, Juli 2019

Penulis

DesiHarianti

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian PerangkatDesa	5
B. Pengelolaan Dana Desa	7
C. Akuntabilitas	12
D. Hubungan Perangkat Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	14
E. PenelitianTerdahulu	15

	F. Kerangka Pikir	20
	G. Hipotesis	20
BAB III	METODE PENELITIAN	21
	A. Jenis Penelitian	21
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	21
	C. Populasi dan Sampel	21
	D. Jenis dan Sumber Data	22
	E. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	24
	F. Teknik Analisis	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
	B. Analisis Data	44
	C. Pembahasan	65
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4.1 Deskripsi Kuesioner Responden	45
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin	46
Tabel 4.3 Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan	46
Tabel 4.4. Karakteristik Responden menurut Lama Bekerja	47
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengaruh Perangkat Desa	49
Tabel 4.6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	53
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas	62
Tabel 4.9. Uji Normalitas	63
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Sederhana	64
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	20
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Era Baru.....	29
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Desa Sukamaju.....	32
Gambar 4.3. Struktur Organisasi Desa Bua.....	35
Gambar 4.4. Struktur Organisasi Desa Pattongko.....	38



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada Desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu implikasi dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintah Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara kesatuan. Pemerintah Desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan Desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di Desa dan kesejahteraan masyarakat (Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dalam segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan amanah kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap Tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Berkaitan dengan Dana desa, Badan Pemeriksaan Keuangan menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan Dana desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi (Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri). Seperti kasus yang menjerat dua Kepala Desa yakni Desa Passimarannu Kecamatan Sinjai Timur dan Desa Tellulimpoe kecamatan Tellulimpoe yang ditangani oleh pihak tindak pidana korupsi (tipikor) polres Sinjai yang di duga bermasalah karena pada laporan pertanggungjawaban mereka yang dimuat tahun 2016 pekerjaan fisik pemecah tanggul dan drainase rampung 100 persen namun pekerjaan dilapangan belum rampung pekerjaannya. Karena itu kedua kepala desa bersama aparat Desa diproses untuk memprtanggungjawabkan anggaran desa yang telah dipergunakan tahun 2016 lalu (TribunSinjai.com, diakses Sabtu 17 maret 2019).

Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 3 menyebutkan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBdesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa desa
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL

6. Menyetujui RAK Desa; dan
7. Menyetujui SPP.

Kecamatan Tellulimpoe merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai Terdiri dari 11 Desa. Hampir dari keseluruhan kepala desa yang ada di kecamatan tellulimpoe hanya menyelesaikan pendidikan terakhir ditingkat SMA begitu juga dengan para perangkatnya. Salah satu penyebab utama terjadinya penyelewengan atau korupsi karena kurangnya kompetensi dari kepala desa dan perangkat desa

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dua diantaranya yaitu Sarifuddin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel (2018) membuktikan bahwa kompetensi aparat pengelola Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Gorontalo kemudian Arif Widyatama, Lola Novita dan Diarespati (2017) membuktikan bahwa kompetensi aparatur dari pemerintah Desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa. Dari penelitian tersebut terdapat hasil penelitian berbeda mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dengan judul **“Pengaruh Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh perangkat desa terhadap

akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (studi kasus Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai).

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh perangkat Desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (studi kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi untuk pengembangan ilmu akuntansi sektor publik
- b. Sebagai salah satu acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat berguna untuk perangkat desa dalam mengelolah Dana Desa.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah bukti empiris dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta dapat di jadikan referensi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang sama dan dapat di terapkan di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perangkat Desa

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa adalah salah satu unsur pemerintah desa sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa. (Indrianasari, 2017).

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan (Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).

Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa :

1. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun;
3. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk
 - b. Surat pertanyaan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai
 - c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesiadan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai

- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang
- e. Akte kelahiran atau surat keterangan kenallahir
- f. Surat keterangan berbadan sehatdari petugas puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang
- g. Surat permohonan jadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai.

Mekanisme Pemberhentian perangkat Desa Permendagri Nomor 67 Tahun 2017:

- a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonslutasi dengan camat
- b. Perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan
- c. Perangkat Desa di berhentikan jika usia telah genap 60 tahun, dinyatakan sebagai terpidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa serta melanggar larangan sebagai perangkat Desa
- d. Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan

- e. Pemberhentian perangkat Desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat
- f. Rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

B. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. (Yuliyansyah dan Rusmianto, 2015:47)

1. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan Desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (KadekSutrawari).

Mekanisme perencanaan menurut Permandagri No 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Sekertaris Desa Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam dalam APB Desa

- b. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa, prinsip penyusunan APB Desa, teknis penyusunan APB Desa dan hal khusus lainnya
- c. Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan Oktober tahun berjalan disampaikan kepala Desa Kepada Bupati/Wali Kotamelalui Camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- d. Evaluasi Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati/ Wali Kota dapat mengundang kepala Desa atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan
- e. Peraturan Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa yang ditunjuk oleh Bupati/ Wali Kota yang di buat oleh pemerintah dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur keuangan pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan di Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah (Kadek Sutrawati).

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (Permandagri Nomor 20 Tahun 2018)

- a. Nomor rekening Kas Desa dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota dan Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kepada Gubernur dengan Tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa untuk pengendalian penyaluran Dana transfer
- b. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penggunaan biaya tak terduga harus dibuat rincian RAB, dan disahkan Kepala Desa
- d. Sekertaris Desa dalam melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 hari sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA
- e. Dalam hal terjadi perubahan peraturan Desa tentang APB Desa kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi untuk menyusun rancangan DPPA paling lama 6 hari kerja setelah penugasan
- f. Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa

- g. Arus kas masuk dan arus kas keluar yang memuat pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- h. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Desa diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada perundang-undangan
- i. Mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan bertanggungjawab keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD desa. (Hamzah, 2015: 35)

Menurut Permandagri No 20 Tahun 2018 pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan
- b. Kaur keuangan wajib membuat buku kas umum terdiri atas buku pembantu bank, pembantu pajak, dan buku pembantu panjar

- c. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa
- d. Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa
- e. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan disampaikan kepada kepala Desa untuk disetujui

4. Pelaporan

menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas kewenangan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat
- b. Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatandengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan
- c. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan

5. Pertanggungjawaban

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa disertai laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program ectoral dan program lainnya yang masuk ke Desa

- c. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan
- d. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

C. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah konsep pemberdayaan (empowerment). Penguatan kapasitas pelaksana tugas atau produsen, juga penguatan kesadaran konsumen akan pelayanan yang menjadi haknya. Konsep akuntabilitas akan menjadi hampa makna jika kapasitas pelaksana (agent) terbatas atau dibatasi dan kesadaran atau konsekuensi pelaksanaan tugas tidak disertai perhatian yang serius dari pihak-pihak yang berkepentingan. (Hanun: 2009)

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas public terdiri atas dua macam, yaitu: Akuntabilitas Vertikal (*vertical Accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). (Mardiasmo: 2009)

Akuntabilitas Vertikal (*vertical Accountability*) Merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit (Dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. (Mardiasmo: 2009)

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi, Mardiasmo dalam kutipan Ellwood (2009) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber Dana publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsiv dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah

mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

D. Hubungan Perangkat Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Yuliansyah dan Rusmianto)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD yang terdiri atas sekretaris, kaur, kasi dan kaur keuangan (permendagri Nomor 20 tahun 2018).

Perangkat Desa dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa saling berhubungan, tuntutan mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menjadi fokus penting bagi perangkat Desa, sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya Visi dari Undang-Undang Desa yaitu mewujudkan Desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokrasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa perangkat Desa dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa saling berhubungan diantaranya: Novindra Dwi Setiana, Nurlaelayuliani membuktikan bahwa dengan berperangnya perangkat Desa dalam pengelolaan Dana Desa, maka pengelolaan dana Desa akan berkualitas baik dan transparan. Penelitian ini sesuai dengan teori Agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara principals dan agen, dimana kepala Desa bertanggungjawab sebagai pengambil keputusan terhadap perangkat Desa sebagai agen yang ikut berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani (2017)	Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Tujuan penelitian ini untuk menguji pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa.	Analisis: teknik kuesioner	Hasil Adjusted R Square menunjukkan bahwa variable perangkat desa dan pemahaman perangkat desa dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Dana desa sebesar 44,8% sedangkan sisanya 55,2% dipengaruhi

					<p>oleh variable atau factor lain yang tidak diteliti atau diluar model regresi penelitian ini. Hasil uji statistic F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F table yang artinya model yang digunakan tidak bagus. Hasil uji t menunjukkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa.</p>
2	<p>Sarifudin Mada, LintjeKalangi, dan Hendrik Gamaliel (2018)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorongtalo.</p>	<p>Tujuan penelitian ini menguji Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorongtalo.</p>	<p>Anlisis instrument kuesioner.</p>	<p>Kompotensi aparat pengelola Dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana desa di Kabupaten Gorongtalo</p>
3	<p>Arif Widyatam</p>	<p>Pengaruh Kompotensi</p>	<p>Tujuan dari penelitian ini</p>	<p>Analisis: Obserfasi.</p>	<p>Kompotensi aparatur dari</p>

	a, Lola Novita, dan Diarespati (2017)	dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa.	untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi Dana desa		pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi Dana desa
4	Neny Tri Indrianasari (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)	Tujuan menguji peran penelitian ini menguji peran perangkat desa Dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Analisis: penyebaran kuesioner	Perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014
5	Nur Ida Yesinia, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari (2018)	Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa.	Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi Dana Desa (studi kasus pada Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten	Metode analisis: Penyebaran kuesioner	Peran perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

			Lumajang).		
6	Supadmi dan Dharma Saputra (2018)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji secara empiris kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan keuangan pengaruhnya terhadap akauntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar	Analisis data dilakukan dengan metode survey dan wawancara dengan menggunakan kuesioner	hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sasaran anggarandan sistem pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabnilitas pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar
7	Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini bertujuan memperoleh bukti empiris pengaruh kompetensi, kepemimpinan dan partisipasi pada akuntabilita pengelolaan Dana Desa	Analisi data dilakukan dengan Metode kuesioner	Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi, kepemimpinan dan partisipasi berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan Dana Desa
8	Rina Widyanti (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Nagari Ulukan Kecamatan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan	Analisi data dilakukan dengan Analisi Teknik Kuesioner	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas manajemen Dana Desa Nagari Ulakan telah

		Ulukan Tapakis	Dana Desa.		mengikuti permandagri 113 pada tahun 2014, tetapi pelaporannya tidak tepat waktu
9	Komang Adi Kurniawan Saputdra, Putu Dian Pradnyanit asari, dkk 2019	Praaktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa	Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia terhadap proses pemcegahan Fraud dalam pengelolaan Dana Desa di Provinsi Bali	Teknik Kuesioner	Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa variabel akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan Dana Desa
10	Kardiyono (2017)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan dan strategi serta kendala yang dimiliki oleh pemerintah desa Karangwuni dalam implementasi Undang-Undang Desa.	Analisi data dilakukan dengan cara wawancara Observasi, dan Dokumentas	Kesiapan pemerintah Desa Karangwuni dalam implementasi Undang-Undang dikatakan sudah cukup baik dilihat dari kemampuan pemerintah Desa Karangwuni dalam pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

F. Kerangka Pikir

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebinyakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Akuntabilitas adalah konsep pemberdayaan (empowerment). Penguatan kapasitas pelaksana tugas atau produsen, juga penguatan kesadaran konsumen akan pelayanan yang menjadi haknya, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir



G. Hipotesis

Diduga bahwa perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

BAB III

JENIS PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. (Sugiyono: 2013)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe, di empat kantor Desa yang ada di Kecamatan Tellulimpoe, yakni Desa Era Baru, Sukamaju, Bua dan desa Pattongko. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni, Tahun 2019.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wialyah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristiik tertentu. Ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono2018:115)

Populasi dalam penelitian ini seluruh perangkat desa yang ada diKecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, sebanyak 11 desa, terdiri dari Desa Pattongko sebanyak 16 perangkat desa, Desa Era Baru sebanyak 13 perangkat desa, Desa Sukamaju sebanyak 18 perangkat desa, Desa Bua sebanyak 14 perangkat desa, Desa LembangLohe sebanyak 12 perangkat

desa, Desa Saotengah sebanyak 15 perangkat desa, Desa massaile sebanyak 13 perangkat desa, Desa Kalobba sebanyak 15 perangkat desa, Mannanti sebanyak 15 perangkat desa, Desa Samaturue sebanyak 12 perangkat desadan Desa Tellulimpoe sebanyak 14 perangkat desa, total 154 responden.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2008: 116)

Penentuan pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu apabila jumlah subjeknya lebih besar dari 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-55% (Arikunto 2008:116). Penelitian ini menggunakan 40% sampel dari jumlah populasi, yaitu 61 perangkat Desa yang terdiri dari 4 Desa sebagai responden dikarenakan populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi, keterbatasan tenaga, waktu dan biaya dan adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel tersebut.

D. Jenis dan Sumber Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kuesioner untuk mendeskripsikan mengenai peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana desa.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka – angka yang dapat diukur atau dinilai secara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi

data kuantitatif adalah persentase penilaian jawaban responden penelitian ini

2. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang mejadi data primer adalah hasil jawaban responden pada kuesioner yang digunakan pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berupa data data telah tesedia yang dapat diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui jurnal dan informasi yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan sebenarnya secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengaruh perangkat Desa terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran angket yang berisi pernyataan kepada seluruh perangkat desa yang

ada di desa Era Baru, desa Sukamaju, Desa Bua dan Desa Pattongko.

- b. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui Tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.
- c. Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen – dokumen lembaga berupa struktur organisasi, visi misi, dan sejarah terbentuknya desa
- d. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung ke lapangan.

E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Perangkat Desa (x)

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekertaris Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas pengelolaan Dana desa adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana desa mulai dari kegiatan perencanaan hingga pengawasan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonomi tersebut diharapkan desa dapat mengelolah keuangannya

tersebut secara mandiri, baik mengelolah pendapatan dan mengelolah pembelanjaan anggaran.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas

Validitas adalah “kebenaran” sebuah data, yaitu sejauh mana sebuah data secara akurat menggambarkan fenomena sosial yang dirujuk. Kriteria yang digunakan untuk menyatuhkan suatu instrument dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis adalah:(EfferinSujuko: 2008)

Apabila koefisien korelasi lebih besar atau sama dari 0,30, maka valid, demikian sebaliknya.

b. Uji Reabilitas

Reliabilitas data adalah sejauh mana konsistensi kategorisasi data jika di lakukan oleh peneliti yang lain atau peneliti yang samadalam kejadian yang berbeda. Kriteria yang di gunakan untuk menyatakan suatu instrument dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,60. (SujokoEfferin :2008)

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dianalisis mempunyai residu atau variabel gangguan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorow-Smimov Test* (Gozali,2013). Dasar

pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas (Asym sign) lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residu dari model regresi berdistribusi normal.

3. Uji Regresi linear sederhana

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$Y' = a + bX + e$$

Dimana:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila X = 0)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

e = Error term (residual)

4. Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Pengujian koefisien secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (sendiri) terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis statistik yang akan diuji sebagai berikut: jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka

perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai, Kecamatan Tellulimpoe merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupate Sinjai yang memiliki luas wilayah 147.30 Km, terdiri dari 11 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 33. 054 jiwa, jumlah laki-laki 15.786 orang dan jumlah perempuan 17.268 orang, yang menjadi fokus penelitian di Kecamatan Tellulimpoe adalah perangkat desa yang ada di desa Era Baru, desa Sukamaju, desa Bua dan Desa pattongko.

1. Desa Era Baru

Era Baru merupakan pecahan desa pattongko pada tahun 1985, yang terbentuk pada masa Orde Baru, disepakati oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku adat. Desa Era Baru terletak dibagian Timur ibukota Kecamatan Tellulimpoe dengan jarak kurang lebih 6 kilometer dari ibukota Kecamatan, dan berada dibagian Selatan ibukota Kabupaten Sinjai dengan jarak tempuh kurang lebih 27 Km, letak geografis dari desa Era Baru terdiri dari 5 Dusun, 10 RW, dan 20 RT, dan didiami penduduk laki-laki 2.032, perempuan 2.122, jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 4.154, dengan jumlah KK sebanyak 1.085. Dengan luasa wilayah 11,32 Km.

Adapun kepala Desa yang pernah memimpin atau memerintah di desa Era Baru adalah: H. Muh Tahir (1985-1997), Muh. Yusuf (1998-2006), Abd.Jabbar (2006-2008), Muh.Amir (2008-2015), Baharuddin (2016 sampai sekarang). Adapun Visi Misinya adalah

a. Visi

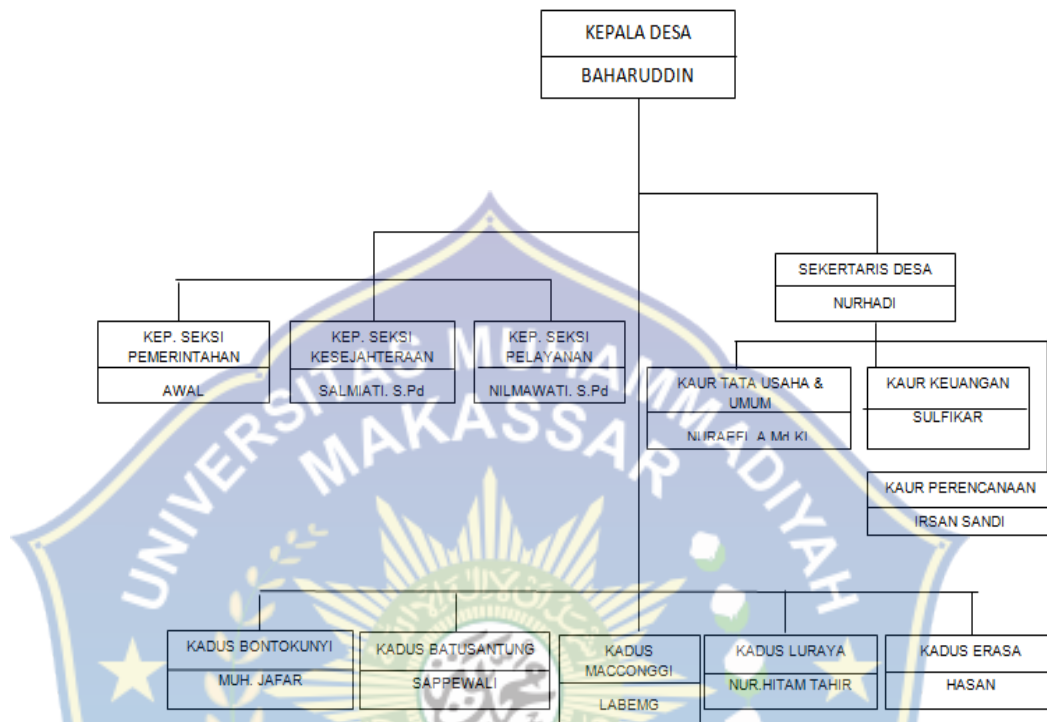
Desa Era Baru yang sejahtera, agamis, nasionalis, dan mengedepankan pelayanan publik

b. Misi

1. Meningkatkan mutu kesejahteraan semua lapisan masyarakat Era Baru melalui peningkatan SDM yang berkualitas
2. Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan desa secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan- undangan
4. Mendukung dan melakukan percepatan pembangunan dengan 5 abdi (panca abdi) kabupaten sinjai (mengabdikan untuk Masyarakat membangun bidang agama, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan infrastruktur) melalui program kerja desa dan partisipasi masyarakat
5. Menumbuhkan gairah individu-individu yang mau dan mampu menjadi insan yang tangguh dalam pengembangan usaha di desa Era Baru
6. Mengembangkan potensi desa/ masyarakat untuk berdaya guna.

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Desa Era Baru



Sumber penghasilan utama penduduk desa Era Baru adalah pertanian dan perkebunan. Penduduk desa Era Baru menggunakan dua bahasa sehari-hari yaitu bahasa bugis dan bahasa konjo Kajang.

Adapun batas-batas wilayah desa era baru adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Desa Sukamaju
- Sebelah barat berbatas dengan Desa Tellulimpoe
- Sebelah timur berbatas dengan Desa Pattongko
- Sebelah selatan berbatas dengan Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba

2. Gambaran Umum Desa Sukamaju

Desa Sukamaju adalah mekarang dari desa bua dan nama Desa Sukamaju adalah suatu nama yang bersumber dari nama desa yang ada di Pulau Jawa danyang memberikan nama desa Sukamaju yaitu Puang Badu Kepala Desa Bua pada waktu itu yaitu pada Zaman Film Si Unyil dia selalu menontong film si Unyil disitu ada desa yang terkenal dan cukup maju pembangunannya yang Namanya desa Sukamaju ,Maka diadakanlah Rapat yang dihadiri oleh Camat Sinjai Timur dan diputuskan bahwa nama desa yang akan dibentuk diberi nama desa Sukamaju dan Tempat Kantornya diberikan Puang Muh. Amin, S yang menunjuk Lokasi yang akan didirikan Kantornya Maka ditunjuklah dipinggir Lapangan Beringin jaya (Longrae) dan pada saat itu karena Pak Camat sudah mau meresmikan desa Sukamaju sementara Belum ada Bangunan Kantornya maka pada saat itu Rumah yang mau dibangun oleh puang Muh. Amin.S dijadikan Bangunan Kantor sementara.

Desa Persiapan yang Namanya desa Sukamaju dibentuk pada Tahun 1986 yang dipimpin oleh Muh.Yusuf.M dan pada tahun 1990 desa persiapan menjadi desa depinitif.

Desa Sukamaju adalah Desa yang berada di Sebelah Selatan Ibu Kota Kabupaten Sinjai Tepatnya di wilayah Kecamatan Sinjai Timur pada saat pemekarang yang membawahi 3 (Tiga) Dusun dan Masing-masing dipimpin oleh:

- a. Dusun Banoa dipimpin oleh Maddipuneng
- b. Dusun Banoa 1 dipimpin oleh Muh. Amin. S
- c. Dusun Tombolodipimpin oleh Nuji

Ketiga Kampung tersebut masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, Kemudian pada tahun 1994 Dusun Tombolo dan Banoa satu di mekarkan menjadi satu Dusun dan Dusun Banoa 1 di Rubah Namanya menjadi Dusun Batulohe dan Mekarannya adalah Dusun BontoTappalang di singkat Dusun Bontang dan sekarang menjadi 4 Dusun yakni:

- a. Dusun Batulohe,
- b. Dusun Tombolo
- c. Dusun Banoa
- d. Dusun BontoTappalang (Bontang)

Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin atau memerintah di Desa Sukamaju adalah : Muh. Yusuf M (1986 – 1991), PELTUSunan Derajad (Tahun 1991- 1996), SERMA Muh. Amir Abdullah (1996 – 2001), Salahuddin, S.Sos (2001 – 2014), Kamaruddin Padung (2014 – 2015 Pejabat Sementara), Muhammad Kabir, S.Sos Tahun 2015 (Pejabat Sementara), Kamaruddin Padung Tahun 2015 sampai Sekarang, adapun Visi misi desa Sukamaju adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Desa Sukamaju yang tertib administrative, sejahtera dan religious

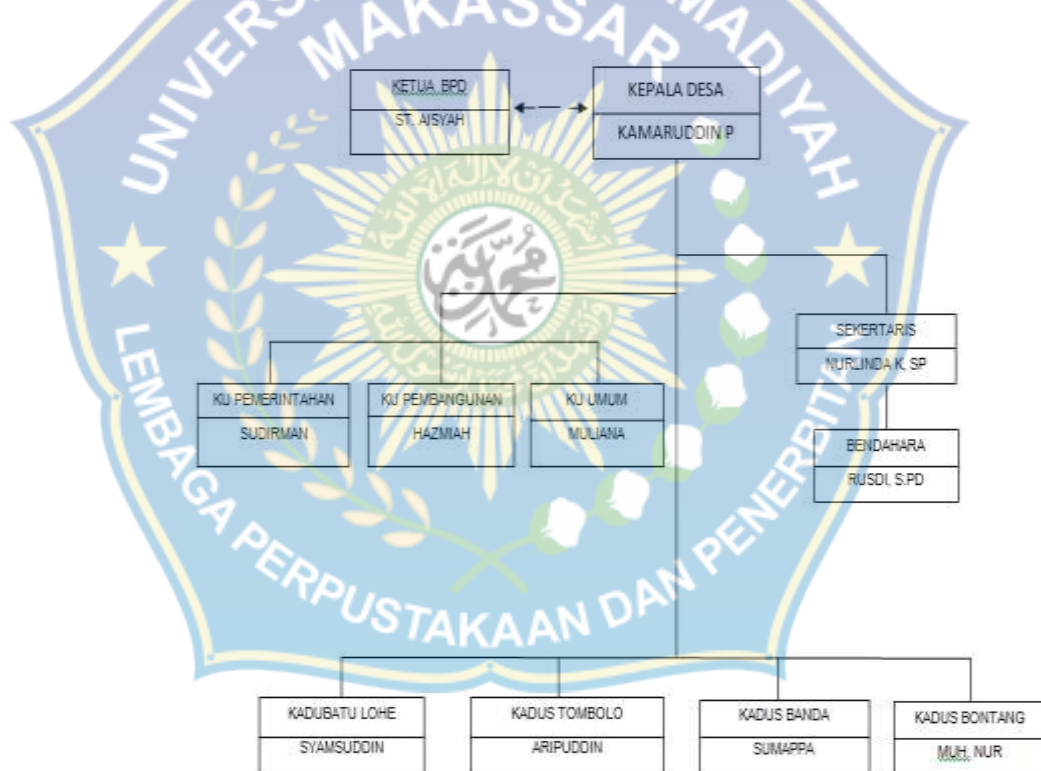
b. Misi

- 1) Terciptanya tertib administrasi di desa khususnya dibidang pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih professional, efektif dan efisien

- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya
- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik
- 4) Meningkatkan sumber daya manusia melalui pembinaan keagamaan

c. Struktur organisasi

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Desa Sukamaju



Jumlah penduduk desa Sukamaju secara administrasi tercatat berjumlah 4.011 Jiwa dengan total Kepala Keluarga 1.091 KK di tahun 2014, jenis kelamin perempuan sekitar 2.016 jiwa dan jenis kelamin laki-laki sekitar 1.995 Jiwa.

Desa Sukamaju merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang letaknya disebelah selatan dengan Ibu kota kabupaten, desa ini adalah desa dataranyang menyimpan potensi alam yang luar biasa dari potensi Tambang Galian C potensi pertanian, Potensi Perkebunan dan Tanaman yang dikembangkan adalah buah Naga dan lain-lain. Luas wilayah desa Sukamaju sekitar 12,33 KM2 dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lasiai dan Desa Biroro
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bua
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Era Baru
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tellulimpo dan Kelurahan Mannanti

Orbitasi waktu tempuh dan letak desa Sukamaju adalah :

- 1) Jarak dari ibukota Kecamatan 7Km
- 2) Jarak dari ibu kota Kabupaten 25K
- 3) Jarak dari ibukota Propinsi 250 Km

3. Desa Bua

Konon dahulu kala di salah satu Dusun yang ada di Desa Bua namanya Dusun Turuneng tetapi dahulu dinamai "KULAMBU", ada mata air yang memancar bag air mancur.

Pada Pemerintahan LAOPU DAENG PATAU (Pemerintahan Pertama Desa Bua) pada saat itu ia memberi perintah setiap masyarakat yang lewat didekat mata air tersebut diwajibkan melemparkan tanah kearah mata air tersebut, dalam bahasa bugis di namai "BUANG TANA" mungkin Pemikiran beliau pada saat itu agar mata air tersebut tidak memancar lagi

sehingga tidak membahayakan para penduduk disekitarnya saat itu ,maka dari itu desa Bua dulunya dinamai “BUA TANA” berasal dari kata BUANG TANA tersebut, sampai pada pada masa pemerintahan “PABICI DAENG PAESA”, karna Masyarakat selalu memanggilnya dengan Sebutan PUANGBUA sehingga mulai pada saat itu BUA TANA dipresingkat namanya menjadi “BUA”.

Hingga pada hari ini mata air tersebut masih tetap dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari namun sudah tidak memancar lagi karean masyarakat merubahnya menjadi sumur yang tidak pernah kering walau Musim kemarau panjang sekalipun.

Jumlah penduduk desa Bua adalah 3.560 jiwa, tersebar di 5 Dusun, dengan distribusi penduduk menurut jenis kelamin yakni laki-laki 1.763 orang dan perempuan 1.797 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 967 KK.

Dalam pemenuhan kebutuhan matapencaharian, masyarakat desa Bua, 80% adalah sebagai petani, dan 10 % adalah nelayan 0,5 % PNS termasuk TNI/POLRI.

Adapun Visi Misi desa bua adalah sebagai berikut:

a. Visi

Komitmen atau ketetapan hati untuk bertekad membangun desa Bua yang maju dan berkembang dengan tata kelola pemerintah desa yang baik dan bersih guna mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera.

b. Misi

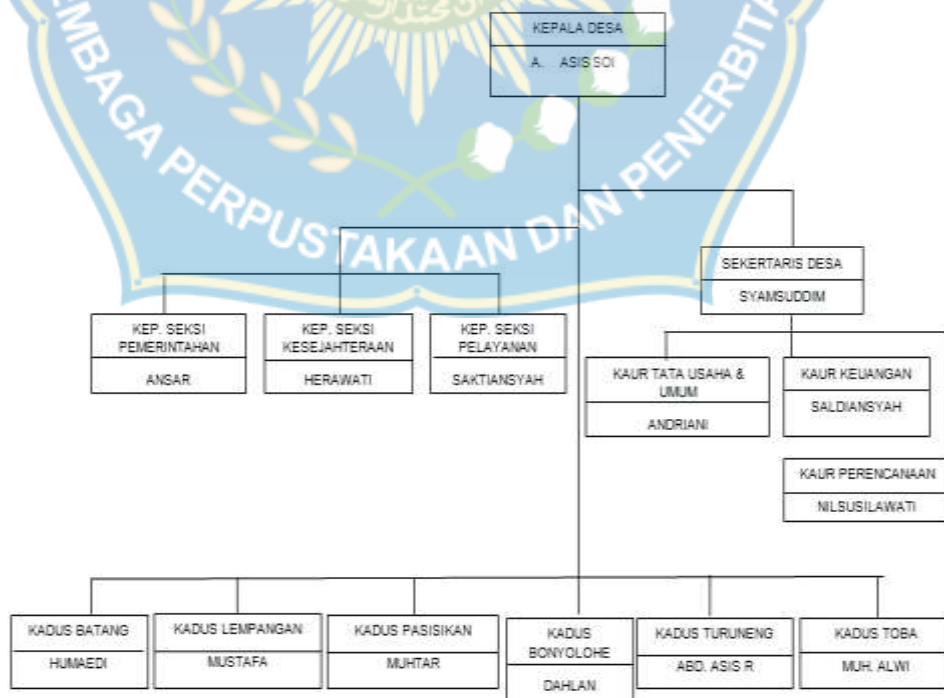
1) Melaksanakan tugas dan kewajiban desa didepan masyarakat secara

terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 2) Menjalankan roda pemerintahan didepan masyarakat dengan semangat sesuai fungsi dan kewajiban masing-masing, sehingga menjadi sesuatu kekuatan yang bisa menghntarkan desa bua menjadi lebih baik
- 3) Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana kehidupan masyarakat desa yang demokrasi dan agamis.
- 4) Menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan mitra kerja di desa
- 5) Meningkatkan pendidikan di desa dan peningkatan peran pemuda
- 6) Adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Desa Bua



Desa Bua termasuk salah satu Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai merupakan desa Tertua di Kecamatan Tellulimpoe dengan luas wilayah 11,58 Km². Desa Bua berada pada bagian Pesisir dan perbukitan, Desa Bua mempunyai jarak dengan ibu kota Kabupaten Sinjai adalah 13 Km. Jarak Desa Bua ke Ibu kota Provinsi adalah 220 Km.

Adapun Batas-Bats Desa Bua adalah:

- 1) Sebelah Utara: Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur
- 2) Sebelah timur: Teluk Bone
- 3) Sebelahbarat: Desa Sukamaju Kecamatan Tellulimpoe
- 4) Sebelahselatan: Desa Pattongko Keacmatan Tellulimpoe

4. Desa Pattongko

Desa pattongko merupakan salah satu desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai terletak dibagian Timur ibu kota Kecamatan Tellulimpoe, secara geografis Desa Pattongko dinilai strategis. Terbentuknya Desa Pattongko adalah pemekaran dari Desa Pattongko pada tahun 1985 dan pemberian nama tersebut oleh Arung Pattongko dan disepakati oleh Tokoh-Tokoh sehingga lahirlah nama Desa Pattongko yang terbentuk pada masa Orde Baru. Adapun Visi misi desa Pattongko adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menuju Desa Pattongko sebagai Desa yang terdepan dalam pelayanan prima kepada Masyarakat yang transparansi dan penuh tanggungjawab

b. Misi

- 1) Melakukan reformasi system kinerja pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seacra cepat

dan tepat

- 2) Melakukan pembangunan yang lebih baik dan merata berdasarkan asas musyawarah, mufakat serta dapat di pertanggungjawabkan sehingga perwujudan ekonomi desa menjadi baik
- 3) Mengintegrasikan nilai-nilai agama sosial dan budaya

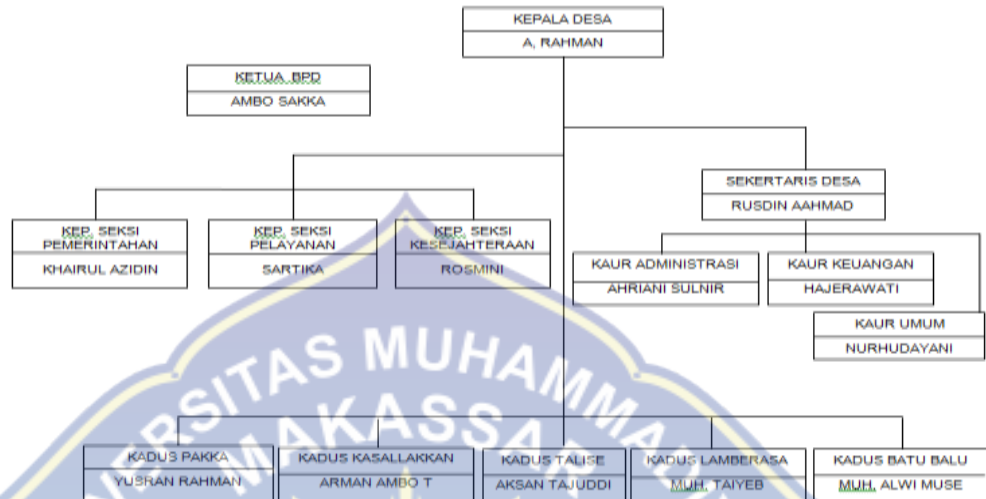
Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Pattongko berada di dataran rendah, berbukit dan tinggi wilayah sekitar 100meter dari permukaan laut, Desa Pattongko terletak dibagian Timur ibu kota Kecamatan Tellulimpoe dengan jarak kurang lebih 9 Kilometer dari ibu kota Kecamatan dan berada dibgian Selatan ibu kota Kabupaten Sinjai dengan jarak tempuh kurang lebih 30 Kilometer, Pattongko terdiri dari lima Dusun dengan luas wilayah 11,32 Kilometer. Dan pada tahun 2016 Desa Pattongko dimekarkan menjadi lima dusun yaitu Dusun Pakka, Dusun Kalsalakan, Dusun Talise, Dusun Lamberasa dan Dusun Batu-Balu, dengan Jumlah penduduk 3.655 jiwa, Jumlah Laki-laki 1.770, Jumlah perempuan 1.880 dan Jumlah KK sebanyak 986. Sumber pendapatan penduduk Desa Pattongko adalah pertanian dan Nelayan.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukamaju
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Era Baru
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Batu Nilamung, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tellulimpoe

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.4. Struktur Organisasi Desa Pattongko



Adapun fungsi dari struktur organisasi desa adalah sebagai berikut:

5. Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh BPD
3. Mengajukan Rancangan peraturan Desa
4. Menetapkan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
5. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa mengenai APBD untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina perekonomian Desa
8. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif

9. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan
10. Melaksanakan wewenang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.

6. Sekertaris Desa

Sekertaris Desa mempunyai tugas

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsifan dan laporan
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur dan kegiatan sekertaris Desa
3. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi dan memelihara kekayaan Desa)
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa
5. Menyusun rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa serta pelayanan Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa
6. Mengadakan dan melaksanakan Persiapan rapat dan mencatat hasil hasil rapat
7. Melaksanakan administrasi kepegawaian aparat desa
8. Memberikan saran dan pendapat Kepala Desa
9. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala Desa
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Desa

7. Pelaksana tekhnis lapangan atau kepala urusan (KAUR)

Pelaksana tekhnis mempunyai tugas dan fungsi merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan segala usaha kegiatan yang menjadi kewenangan dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan

pemerintah Desa yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaksana teknis lapangan atau kepala urusan yang ada dalam organisasi pemerintah Desa meliputi:

a. Kepala urusan pemerintahan Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan administrasi penduduk
- 2) Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan kartu penduduk (KTP)
- 3) Melaksanakan kegiatan administrasi mengenai kewarganegaraan
- 4) Melaksanakan pencatatan administrasi pertanahan
- 5) Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi
- 6) Melaksanakan pencatatan kegiatan kemasyarakatan antara lain: RW, RT dan kegiatan keamanan dan ketertiban serta pertahanan sipil
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi keputusan Desa dan keputusan kepala Desa
- 8) Menyusun rencana keuangan
- 9) Melaksanakan kegiatan administrasi pemilu berdasarkan ketentuan yang berlaku
- 10) Mencatat kegiatan social politik
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

b. Kepala urusan Ekonomi dan pembangunan Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan kegiatan Administrasi pembangunan
- 2) Melaksanakan catatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan

- 3) Menghimpun data potensi serta menganalisa dan memelihara unttuk dikembangkan
- 4) Melaksanakan catatan dan mempersiapkan bahan guna kegiatan daftar usulan rencana proyek dan daftar usulan kegiatan serta mencatat daftar isian proyek atau daftar isian kegiatan
- 5) Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian, perindustrian maupun pembangunan lainnya.
- 6) Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan perekonomian, perkoperasian, perkreditan dan lembaga perekonomian lainnya
- 7) Melaksanakan catatan mengenai triwulan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal permohonan pembuatan Izin Usaha, izin bangunan dan lain-lain.
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa
- 9) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat:
Fungsi kepala seksi kesejahteraan masyarakat adalah:
 - 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan
 - 2) Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragamama
 - 3) Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat dan social kemasyarakatan
 - 4) Melaksanakan tugas- tugas lain yang diberikan kepala desa.

c. Kepala Urusan Administrasi (Kaur Administrasi)

Kepala urusan administrasi bertanggungjawab untuk mengurus

seluruh proses pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

d. Kepala Urusan Umum (Kaur Keuangan)

Fungsi kepala urusan keuangan adalah:

- 1) Mengelola administrasi keuangan daerah
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekertaris desa

Kepala Urusan Umum Mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat - surat masuk dan keluar serta melaksanakan letak kearsipan
- 2) Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah-naskah lainnya
- 3) Melaksanakan penyediaan, penyimpangan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- 4) Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan piket
- 5) Melaksanakan dan mengusahakan dan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan lain milik Desa.
- 6) Meyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- 7) Melaksanakan pengelolaan buku adminstrasi umum
- 8) Mencatat inventarisasi kekayaan
- 9) Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas dan kegiatanrumah tangga pada umumnya

10) Melaksanakan tugas lainya oleh kepala desa dan sekertaris
Desa

e. Pelaksanann kewilayahan (Kepala Dusun)

1) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah kerja yang sudah ditentukan

2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunann

3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa

4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga

5) Membina swadaya dan gotong-royong masyarakat

6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa

7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

8) **Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pada Tahun 2014 BPD baru yang akan bekerja sampai pada Tahun 2020.

B. Analisis Data

1. Tingkat pengembalian Kuesioner

Jumlah kuesioner secara keseluruhan yang disebar peneliti adalah 61 kuesioiner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung Rincian

kuesioner yang disebar, kembali dan tidak kembali dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Deskripsi Kuesioner Responden

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Kuesioner yang disebar	61	100%
Kuesioner yang tidak kembali	15	25%
Kuesioner yang kembali dan dapat digunakan	46	75%

Sumber: Data diolah 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar sebanyak 61 atau sebesar 100%, kuesioner yang tidak kembali sebanyak 15 atau sebesar 25% dikarenakan adanya beberapa perangkat Desa yang berhalangan hadir, dan kuesioner yang kembali dan dapat digunakan hanya sebanyak 46 atau sebesar 75%.

2. Karakteristik umum responden

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis telah meneliti perangkat desa di empat kantor desa yang ada di kecamatan Tellulimpoe kabupaten sinjai, yakni desa Era Baru, desa Sukamaju, Desa bua dan desa Pattongko.

Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori yaitu, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dan karakteristik berdasarkan lama bekerja.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis

kelamin dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Karakteristik responden dapat dilihat pada table 4. 2

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki	25	54,35
Perempuan	21	45,65
Jumlah	46	100

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 25 orang atau sebesar 54,35%, dan jumlah responden perempuan sebanyak 21 orang atau sebesar 45,65%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan.

b. Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu SLTA, D3 dan S1. Adapun jumlah tingkat pendidikan tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
S1	18	39,13
Diploma	1	2,17
SLTA	27	58,70
Total	46	100

Sumber: Data Diolah, 2019

Table 4.3 menunjukkan bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir D3 yaitu 1 orang atau sebesar 2,17%, jumlah responden S1 yaitu 18 orang atau 39,13%, dimana S,Pd.i sebanyak 6 orang, S. Sos sebanyak 4 orang dan S,E sebanyak 10 orang, dan jumlah responden SLTA/ SMA yaitu 27 orang atau sebesar 58,70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan tingkat pendidikan terakhir SLTA/ SMA yaitu 27 orang atau sebesar 58,70%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik responden berdasarkan lama bekrjadalam penelitian ini dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu 1 tahun, 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 9 tahun

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
< 1 tahun	1	2,17
1 – 3 tahun	33	71,74
4 – 6 tahun	6	13,04
7 – 9 tahun	6	13,04
Total	46	100

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah responden dengan tingkat lama bekerja 1 tahun yaitu 1 orang atau sebesar 2,17%, jumlah responden dengan tingkat lama bekerja 1 sampai 3 tahun yaitu 33 orang atau sebesar 71,74%, jumlah responden dengan tingkat lama bekerja 4 sampai 6 tahun yaitu 6 orang atau sebesar 13,04%, dan jumlah responden berdasarkan tingkat lama bekerja 7 sampai 9 tahun yaitu 6 orang atau sebesar 13,04%. Hal tersebut

menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak dalam penelitian ini adalah responden dengan lama bekerja 1 sampai 3 tahun yaitu 33 orang atau sebesar 71,74%.

3. Analisis Variabel Penelitian

a. Tanggapan Responden Terhadap Perangkat Desa (X)

Deskripsi perangkat desa didasarkan pada 7 item pertanyaan/pernyataan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 7 item pernyataan tentang perangkat desa yaitu 1) perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, 2) perangkat Desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan ADD, 3) perangkat Desa memberikan masukan tentang rancangan APBDesa kepada kepala Desa dan/atau BPD, 4) perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan ADD, 5) perangkat Desa memberikan masukan terkait perubahan APBDesa, 6) perangkat desa bersama dengan kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APBDesa, 7) Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terelaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan. Hasilnya ditunjukkan secara deskriptif dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengaruh Perangkat Desa

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden (orang)/(%)										Skor Rata-Rata
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	X1.1	13	2.17	32	69,57	1	2.17	0	0	0	0	4.26
2	X1.2	14	30.43	30	65.22	2	4.35	0	0	0	0	4.26
3	X1.3	13	28.26	23	50.0	6	13.04	4	8.70	0	0	3.98
4	X1.4	20	43.48	23	50.0	2	4.35	1	2.17	0	0	4.35
5	X1.5	22	47.83	23	50.0	0	0	1	2.17	0	0	4.43
6	X1.6	5	10.87	26	56.52	10	21.74	5	10.87	0	0	3.67
7	X1.7	6	13.04	21	45.65	10	21.74	9	19.57	0	0	3.52
		Rata-rata Skor Variabel										4,07

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa 46 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan pertama (X1.1) “perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana desa” ditanggapi responden dengan sangat setuju sebanyak 13 orang atau 2.17%, tanggapan setuju sebanyak 32 orang atau 69,57%, tanggapan kurang setuju 1 orang atau 2.17% dari 46 total responden
- 2) Pernyataan kedua (X1.2) “perangkat Desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan ADD” ditanggapi responden dengan sangat setuju sebanyak 14 orang atau 30,43%, tanggapan setuju sebanyak 30 orang atau 65,22% dan tanggapan kurang setuju sebanyak 2 orang atau 4,35% dari 46 total responden
- 3) Pernyataan ketiga (X1.3) “perangkat Desa memberikan masukan tentang rancangan APBDesa kepada kepala Desa dan/atau BPD” ditanggapi

responden dengan sangat setuju sebanyak 13 orang atau 28.26%, tanggapan setuju sebanyak 23 orang atau 50.0%, tanggapan kurang setuju sebanyak 6 orang atau 13.04%, dan tanggapan tidak setuju sebanyak 4 orang atau 8.70% dari 46 total responden

- 4) Pernyataan keempat (X1.4) “perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan ADD” ditanggapi responden dengan sangat setuju sebanyak 20 orang atau 43.48%, tanggapan setuju sebanyak 23 orang atau 50.0%, tanggapan kurang setuju sebanyak 2 orang atau 4.35% dan tanggapan tidak setuju 1 orang atau 2.17% dari 46 total responden
- 5) Pernyataan kelima (X1.5) “perangkat Desa memberikan masukan terkait perubahan APBDesa ” ditanggapi responden dengan sangat setuju sebanyak 22 orang atau 47,83%, tanggapan setuju sebanyak 23 orang atau 50,0% dan tanggapan tidak setuju 1 orang atau 2.17% dari 46 total responden.
- 6) Pernyataan ke enam (X1.6) “perangkat desa bersama dengan kasi menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APBDesa” ditanggapi responden dengan sangat setuju sebanyak 5 orang atau 10.87%, tanggapan setuju sebanyak 26 orang atau 56.52% kurang setuju sebanyak 10 orang atau 21.74%, dan tanggapan tidak setuju sebanyak 5 orang atau 10.87% dari 46 total responden
- 7) Pernyataan ke tujuh (X1.7) “Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terelaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan” ditanggapi

responden dengan sangat setuju sebanyak 6 orang atau 13.04%, tanggapan setuju sebanyak 21 orang atau 45.65, tanggapan kurang setuju sebanyak 9 orang atau 19.57% dari 46 total responden.

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju, paling sedikit responden yang memberikan penilaian tidak setuju dan tidak ada responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju. Indikator yang paling dominan membentuk variabel perangkat desa adalah perangkat Desa memberikan masukan terkait perubahan APBDesa dengan rata-rata skor 4.43, kemudian disusul indikator perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan ADD dengan rata-rata skor 4.35, sedangkan paling sedikit membentuk variabel perangkat desa adalah Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terelaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Berdasarkan rekapitulasi variable perangkat desa menunjukkan rata-rata yang diberikan responden pada butir pernyataan tentang variable perangkat desa adalah sebesar 4.07.

b. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Untuk pengukuran variabel Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa digunakan pendapat responden dengan indikator perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Deskripsi perangkat desa didasarkan pada 24 item pertanyaan/pernyataan yang diajukan kepada responden. Tanggapan responden terhadap ke 24 item pernyataan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu: 1) sekertaris desa

mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa, 2) sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, 3) Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada badan permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut, 4) Reperdes APBDesa tersebut disepakati bersama, 5) Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disepakati oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi, 6) peraturan Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, 7) bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, 8) pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota, 9) penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa, 10) pengadaan kegiatan yang mengajukan pendaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rancangan anggaran biaya, 11) rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa, 12) berdasarkan surat permintaan pembayaran(SPP) yang diverifikasi Sekretaris Desa apakah Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran, 13) pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara, 14) bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas

Negara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-Undangan, 15) penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan, 16) kaur keuangan wajib membuat buku kas umum, 17) penerimaan desa disetor ke rekening kas desa, 18) pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdsarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala desa, 19) buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan disampaikan kepada kepala desa untuk didryujui, 20) kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, 21) Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, 22) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesadaan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan, 23) kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran, 24) laporan pertanggungjawaban disertai laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Tabel 4.6
Tanggapan Responden Terhadap Variabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Item Pernyataan	Jawaban Responden (orang)/(%)										Skor Rata-Rata
		SS (5)		S (4)		KS (3)		TS (2)		STS (1)		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
1	Y1.1	10	21.74	32	69.57	4	8.70	0	0	0	0	4.13
2	Y1.2	22	47.83	24	52.17	0	0	0	0	0	0	4.48
3	Y1.3	19	41.30	26	56.52	1	2.17	0	0	0	0	4.39

4	Y1.4	15	32.61	30	65.2 2	1	2.17	0	0	0	0	4.30
5	Y1.5	18	39.13	24	52.1 7	4	8.70	0	0	0	0	4.30
6	Y1.6	15	32.61	26	56.5 2	5	32	0	0	0	0	4.22
7	Y1.7	14	30.43	31	67.3 9	1	2.17	0	0	0	0	4.28
8	Y1.8	17	36.96	25	54.3 5	4	8.70	0	0	0	0	4.28
9	Y1.9	13	28.26	22	47.8 3	10	21.74	1	2.17	0	0	4.02
10	Y1.10	10	21.74	25	54.3 5	10	21.74	1	2.17	0	0	3.96
11	Y1.11	16	34.78	27	58.7 0	2	4.35	1	2.17	0	0	4.26
12	Y1.12	10	21.74	25	54.3 5	3	6.52	7	15.22	1	2.17	3.78
13	Y1.13	22	47.83	21	45.6 5	3	6.52	0	0	0	0	4.41
14	Y1.14	15	32.61	28	60.8 7	3	6.52	0	0	0	0	4.26
15	Y1.15	13	28.26	30	65.2 2	3	6.52	0	0	0	0	4.22
16	Y1.16	18	39.13	26	56.5 2	2	4.35	0	0	0	0	4.35
17	Y1.17	22	47.83	24	52.1 7	0	0	0	0	0	0	4.48
18	Y1.18	21	45.65	25	54.3 5	0	0	0	0	0	0	4.46
19	Y1.19	20	43.48	25	54.3 5	1	2.17	0	0	0	0	4.41
20	Y1.20	17	36.96	29	63.0 4	0	0	0	0	0	0	4.37
21	Y1.21	16	34.78	23	50.0	2	4.35	4	8.70	1	2.17	4.07
22	Y1.22	12	26.09	29	63.0 4	4	8.70	1	2.17	0	0	4.13
23	Y1.23	21	45.65	24	52.1 7	1	2.17	0	0	0	0	4.43
24	Y1.24	30	65.22	15	32.6 1	1	2.17	0	0	0	0	4.63
Rata-rataSkor Variabel												4.28

Sumber: Data diolah, 2016

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa 46 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pernyataan pertama (Y1.1) “sekertaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa beradsarkan RKP Desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDesa” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21,74, tanggapan setuju sebanyak 32 orang atau 21.74%, tanggapan kurang setuju sebanyak 3 orang atau 8.70% dari total 46 responden,
- 2) Pernyataan kedua (Y1.2) “sekertaris desa menyampaikan rancanagn peraturan Desa tentang APBdesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 20 orang atau 47.83%, tanggapan setuju sebanyak 24 orang atau 52.17%, dari total 46 responden
- 3) Pernyataan ketiga (Y1.3) “Raperdes APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada badan permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut” di tanggapi responden sangat setuju sabanyak 19 orang atau 41,30%, tanggapan setuju sebanyak 26 orang atau 56.52%, tanggapan kurang setuju satu orang atau 2.17% dari total 46 respponden
- 4) Pernyataan keempat (Y1.4) “Reperdes APBdesa tersebut disepakati bersama” ditanggapi responden sangat sertuju sebanyak 15 orang atau 32.61%, tanggapan setuju sebanyak 30 Orang atau 65.22%, tanggapan kurang setuju satu orang atau 2.17% dari total 46 responden
- 5) Pernyataan kelima (Y1.5) “Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disepakati oleh kepala desa kepada Bupati/ Walikota melalui camat untuk dievaluasi” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 18 orang atau 39.13%, tanggapan setuju sebanyak 24 orang atau 52.17%, dan tanggapan kurang setuju sebanyak 4 orang atau 8.70% dari total 46 responden

- 6) Pernyataan keenam (Y1.6) “peraturan Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan desa tentang APBDesa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 15 orang (32.61), tanggapan setuju sebanyak 26 orang atau 56.52, tanggapan kurang setuju sebanyak 5 orang atau 32% dari total 46 responden
- 7) Pernyataan keTujuh (Y1.7) “bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 14 orang atau 30,43%, tanggapan setuju sebanyak 31 orang atau 67.39%, tanggapan kurang setuju 1 orang atau 2.17% dari total 46 responden
- 8) pernyataan ke Dellapan “pengaturan jumlah uang kas Desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota” di tanggapi responden sangat setuju sebanyak 17 orang atau 36. 96%, tanggapan setuju sebanyak 25 orang atau 54.35%, tanggapan kurang setuju sebanyak 4 orang atau 8.70% dari total 46 responden
- 9) pernyataan ke sebilan (Y1.9) “penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahan oleh Kepala Desa” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 13 orang atau 36.96%, tanggapan setuju sebanyak 22 orang atau 47.83%, tanggapan kurang setuju sebanyak 10 orang atau 2,17%, dan tanggapan tidak setuju 1 orang atau 2.17% dari total 46 responden
- 10) pernyataan ke sepuluh (Y1.10)“ pengadaan kegiatan yang mengajukan pendaanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencangan anggaran biaya” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21.74%, tanggapan setuju sebanyak 25 orang

atau 54.35%, tanggapan kurang setuju sebanyak 10 orang atau 2.17%, dari total 46 responden

11) pernyataan ke sebelas (Y1.11) “rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 16 orang atau 34.78%, tanggapan setuju sebanyak 27 orang atau 58.70%, tanggapan kurang setuju 2 orang atau 4,35% dari total 46 responden

12) pernyataan ke duabelas (Y1.12) “berdasarkan surat permintaan pembayaran(SPP) yang yang diverifikasi Sekertasris Desa apakah Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 10 orang atau 21,74%, tanggapan setuju sebanyak 25 orang atau 54.35%, tanggapan kurang setuju sebanyak 3 orang atau 6.52%, tanggapan tidak setuju sebesar 7 orang atau 15.22% dan tanggapan sangat tidak setuju satu orang atau 2.17% dari total 46 responden

13) pernyataan ke tigabelas (Y1.13) “pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara”, ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 22 orang atau 47.83%, tanggapan setuju sebanyak 21 orang atau 45.65%, tanggapan kurang setuju 3 orang atau 6.52%, dari total 46 responden

14) pernyataan ke empat belas(Y1.14) “bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-Undangan” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 15 orang, tanggapan setuju sebanyak 28 orang atau 60.87%, dan tanggapan kurang setuju sebanyak 3 orang atau 6.52% dari total 46 responden

- 15) Pernyataan ke limabelas (Y1.15) “penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 13 orang atau 28.26%, tanggapan setuju sebanyak 30 orang atau 65.22% dari total 46 responden
- 16) Pernyataan ke enambelas (Y1.16) “keuangan wajib membuat buku kas umum” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 118 orang, atau 39.13%, tanggapan setuju sebanyak 26 orang atau 56.52%, dan tanggapan kurang setuju sebanyak 2 orang atau 4.35% dari total 46 responden
- 17) Pernyataan ke tujubelas (Y1.17) “penerimaan desa disetor ke rekening kas desa”, ditanggapi responden sebanyak 22 orang, tanggapan setuju sebanyak 24 orang atau 52.17%, dari total 46 responden
- 18) Pernyataan ke delapanbelas (Y1.18) “pengeluaran atas beban APBDesadialakukanberdsarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala desa” ditanggapi responden sebanyak 21 orang atau 45.65%, tanggapan setuju sebanyak 25 orang atau 54.35%, dari total 46 responden
- 19) Pernyataan ke sembilanbelas (Y1.19) “buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan disampaikan kepada kepala desa untuk disetujui”, ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 20 orang atau 43.48%, tanggapan setuju sebanyak 25 orang atau 54.35%, dan tanggapan kurang setuju 1 orang atau 2.17% dari total 46 responden
- 20) Pernyataan ke duapuluh (Y1.20) “kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat” ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 17 orang

atau 36.96%. tanggapan setuju sebanyak 29 orang atau 63.04%, dari total 46 responden

21) Pernyataan ke duapuluh satu (Y1.21) "Kepala Desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa", ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 16 orang atau 34.78, tanggapan responden setuju sebanyak 23 orang atau 50.0, tanggapan kurang setuju sebanyak 2 orang atau 4.35%, tanggapan tidak setuju sebanyak 4 orang atau 8.70% dan tanggapan sangat tidak setuju satu orang atau 2.17% dari total 46 responden

22) Pernyataan ke duapuluh dua (Y1.22) "Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesadaan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan" ditanggapi responden sangat setuju sebanyak 12 orang atau 26.09%, tanggapan setuju sebanyak 29 orang atau 63.04%, tanggapan kurang setuju sebanyak 4 orang atau 8.70% tanggapan tidak setuju 1 orang atau 2.17% dari total 46 responden

23) Pernyataan ke duapuluh tiga (Y1.23) "laporan pertanggungjawaban disertai laporan keungan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke Desa" di tanggapi responden sangat setuju sebanyak 30 orang atau 65.22%, tanggapan setuju sebanyak 15 orang atau 32.61%, dan tanggapan kurang setuju 1 orang atau 2.17% dari total 46 responden.

24) Pernyataan ke duapuluh empat (Y1.24) "kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran" di tanggapi responden sangat setuju sebanyak 21 orang atau 45.65%, tanggapan setuju sebanyak 24 orang atau 52.17%, dan tanggapan kurang setuju 1 orang atau 2.17% dari total 46 responden

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sesuai item pernyataan yang digunakan paling banyak responden memberikan penilaian setuju, paling sedikit responden yang memberikan penilaian sangat tidak setuju. Indikator yang paling dominan membentuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dengan rata-rata skor 4.63, kemudian disusul indikator sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dengan rata-rata skor 4.48, sedangkan paling sedikit membentuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekertasri Desa apakah Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran dengan rata-rata skor 3.78, Berdasarkan rekapitulasi variable akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan rata-rata yang diberikan responden pada butir pernyataan tentang variable perangkat desa adalah sebesar 4.28.

4. Analisis Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkapkan konsep gejala/kejadian yang diukur. Item kuesioner dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi $> 0,30$. Pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas

Variabel	Kode	Koefisien korelasi	Keterangan
Perangkat Desa (X)	X1.1	0,602	Valid
	X1.2	0,409	Valid
	X1.3	0,732	Valid
	X1.4	0,337	Valid
	X1.5	0,504	Valid
	X1.6	0,682	Valid
	X1.7	0,641	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y1.1	0,683	Valid
	Y1.2	0,697	Valid
	Y1.3	0,625	Valid
	Y1.4	0,563	Valid
	Y1.5	0,713	Valid
	Y1.6	0,779	Valid
	Y1.7	0,607	Valid
	Y1.8	0,491	Valid
	Y1.9	0,679	Valid
	Y1.10	0,615	Valid
	Y1.11	0,761	Valid
	Y1.12	0,615	Valid
	Y1.13	0,415	Valid
	Y1.14	0,452	Valid
	Y1.15	0,675	Valid
	Y1.16	0,694	Valid
	Y1.17	0,313	Valid
	Y1.18	0,533	Valid
	Y1.19	0,502	Valid
	Y1.20	0,367	Valid
	Y1.21	0,517	Valid
	Y1.22	0,468	Valid
	Y1.23	0,658	Valid
	Y1.24	0,509	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, 2019

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil uji validitas instrumen variabel pengaruh perangkat desa (X) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh nilai koefisien korelasi $>0,30$, artinya setiap butir pernyataan dari variabel perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang digunakan dalam penelitian adalah valid.

2) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dari suatu variabel. Butir pertanyaan dalam variabel dikatakan reliabel atau terpercaya apabila jawaban responden adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$. Adapun hasil uji reliabilitas variabel pengaruh perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variable Penelitian	Alfa Cronbach's	Ket
1	Pengaruh Perangkat Desa (X)	0,639	Reliabel
2	Akuntabilitas pengelolaan dana Desa (Y)	0,910	Reliabel

Sumber: data diolah SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa masing-masing variabel yaitu variabel pengaruh perangkat desa dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperoleh nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$. Dengan demikian, maka hasil uji reabilitas terhadap keseluruhan variabel adalah reliabel.

b. Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang dianalisis mempunyai residu atau variabel gangguan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam

penelitian ini adalah *Kolmogorow-Smimov Test* (Gozali,2013). Dasar pengambilan keputusannya jika nilai probabilitas (Asym sign) lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa nilai residu dari model regresi berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.9
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25989019
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.073
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		.819
Asymp. Sig. (2-tailed)		.513

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Berdasarkan tabel di 4.9 diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,513 > lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan

c. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan apabila ingin mengetahui pengaruh satu variabel bebas (X) terhadap sebuah variabel terikat (Y) atau untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak terdapatnya hubungan antara variabel bebas dengan sebuah variabel terikat. Analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.10
Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	1.833	.390	
Pengaruh Perangkat Desa	.601	.095	.688

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Tabel 4.10 menunjukkan hasil olah data regresi atas pengaruh perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dikecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai. Hasil persamaan regresi linear sederhana dari model penelitian ini yaitu :

$$Y = a + bx + e$$

$$Y = 1,833 + 0,601X + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) a = Nilai konstanta 1,833 menunjukkan apabila variabel perangkat desa (X) bernilai konstan, maka variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) dikecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai memiliki pengaruh positif sebesar 1,833,
- 2) b = 0,601 menunjukkan bahwa jika variabel perangkat desa (X) ditingkatkan, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai akan meningkat sebesar 0,688

d. Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian secara parsial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial (sendiri) terhadap variabel dependennya. Berdasarkan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.833	.390		4.697	.000
Perangkat Desa	.601	.095	.688	6.295	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Dasarkan tabel 4.11 dapat dilihat hasil pengujian terhadap variabel perangkat desa (X) menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar $6.295 > t$ tabel 1.679 dan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perangkat desa (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel perangkat desa (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) di kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai Konsistensi perangkat desa dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Desa dalam

segala aspeknya, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berupa proses perencanaan dana desa, proses penggunaan dana desa, rancangan APBDDesa, proses penatausahaan penggunaan ADD, masukan terkait perubahan APBDDesa, perangkat desa bersama kasi menyusun RAB, Laporan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengaruh perangkat Desa ditingkatkan atau konsistensi perangkat Desa ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai juga akan meningkat

Hasil penelitian ini sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan (Permendagri Nomor 67 Tahun 2017).

Berdasarkan analisis dari pokok pembahasan, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa perangkat Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai Sesuai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Novindra Dw Setiana dan NurLaila Yuliani (2017), Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel (2018) yang menyatakan bahwa perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tellulimpoe kabupaten Sinjai yang artinya bahwa jika pengaruh perangkat Desa ditingkatkan atau konsistensi perangkat Desa ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai juga akan meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran untuk Desa Pattongko, Desa Era Baru, Desa Sukamaju dan Desa Bua, perangkat Desa memiliki pengaruh positif dan signifikan, sehingga diharapkan untuk lebih ditingkatkan agar akuntabilitas pengelolaan dana Desa dapat lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Kurniawan komang Saputra dkk.2019. *Praktek Akuntabilitas dan Kompotensi Sumber DayaManusia Untuk Pencegahan Fraud DalamPengelolaan Dana Desa*.Universit asWarmadewa Denpasar Bali Indonesia.
- Ariikunto. S. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktieka*. Edisi Revisi 6. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ayu Julia Ni Komang Praba Dewi & Gayatri. 2019. *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.Universitas Udayana Bali Indonesia.
- Dwi, Novindra Setiana dan Nurlaela Yuliani. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap pAkuntabilitas Pengelolaan Dana*. FakultasEkonomdanBisnis. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Efferin, Sujukodkk. 2008. *MetodePenelitianAkuntansi: Mengungkap Penomena Dengan Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif*. Grahallmu.Yogyakarta.
- Ghozali, Iman. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas diponegoro.
- Hanun.2009. *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesi*. Jakarta. Selemba Empat.
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata KelolaPemerintahanDesaMenujuDesaMandiri, Sejahtera, danPartisipatoris*. Pustaka Jawa Timur.
- Ida, Nur Yesinia. Dkk. 2018.*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.Fakultas Ekonomi Universitas MuhammadiyahJamber.
- Mada, Sarifudin dkk.2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sam Ratulangi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Rosyidi Muhammad. 2018. *Pengaruh Transparansi Kompotensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam mengelola Alokasi Dana Desa*.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.

Supadmi N.L & Dharma Saputra.2018.*Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar.*Fakultas Ekonomi dan Bisnis.UniversitasUdayana.

Try, NenyIndrianasari. 2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.* STIE Widya Gama Lamajang.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permandagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

WidyantRina. 2018. *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis.* Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Widyatama, Arif dkk.2017. *Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).*STIE Panca Bhakti Palu.

YuliansyahdanRusmianto. 2015. *Akuntansi Desa.* Salemba Empat. Jakarta.

<https://www.google.com/amp/makassar.tribunnews.com/amp/2017/08/10/2-2-kades-diproses-tipikor-polres-sinjai-diduga-terlibat-kasus-ini>





LAMPIRAN 1

UJI VALIDITAS

CORRELATIONS

/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 Xtotal

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Correlations							
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	Xtotal
X1.1	Pearson Correlation	1	.158	.424**	.324	.422**	.161	.176	.602**
	Sig. (2-tailed)		.294	.003	.028	.004	.285	.242	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
X1.2	Pearson Correlation	.158	1	.107	.298	.320	.046	.032	.409
	Sig. (2-tailed)	.294		.481	.045	.030	.760	.833	.005
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
X1.3	Pearson Correlation	.424**	.107	1	.237	.302	.421**	.276	.732**
	Sig. (2-tailed)	.003	.481		.112	.041	.004	.063	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
X1.4	Pearson Correlation	.324	.298	.237	1	.321	-.233	-.252	.337
	Sig. (2-tailed)	.028	.045	.112		.029	.119	.091	.022
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
X1.5	Pearson Correlation	.422**	.320	.302	.321	1	-.021	-.016	.504**
	Sig. (2-tailed)	.004	.030	.041	.029		.890	.915	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
X1.6	Pearson Correlation	.161	.046	.421**	-.233	-.021	1	.872**	.682**
	Sig. (2-tailed)	.285	.760	.004	.119	.890		.000	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
X1.7	Pearson Correlation	.176	.032	.276	-.252	-.016	.872**	1	.641**
	Sig. (2-tailed)	.242	.833	.063	.091	.915	.000		.000
	N	46	46	46	46	46	46	46	46
Xtotal	Pearson Correlation	.602**	.409	.732**	.337	.504**	.682**	.641**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.005	.000	.022	.000	.000	.000	
	N	46	46	46	46	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

CORRELATIONS

/VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Y1.21 Y1.22 Y1.23 Y1.24 Ytotal
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

		Y1.19	Y1.20	Y1.21	Y1.22	Y1.23	Y1.24	Ytotal
Y1.1	Pearson Correlation	.267	.066	.320	.202	.407	.248	.683
	Sig. (2-tailed)	.073	.664	.030	.178	.005	.096	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.2	Pearson Correlation	.400	.349	.296	.143	.440	.259	.697
	Sig. (2-tailed)	.006	.017	.046	.342	.002	.082	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.3	Pearson Correlation	.350	.284	.375	.295	.318	.207	.625
	Sig. (2-tailed)	.017	.056	.010	.047	.031	.168	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.4	Pearson Correlation	.178	.252	.272	.211	.313	.096	.563
	Sig. (2-tailed)	.235	.091	.068	.159	.034	.525	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.5	Pearson Correlation	.473	.277	.330	.118	.385	.278	.713
	Sig. (2-tailed)	.001	.062	.025	.436	.008	.061	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.6	Pearson Correlation	.318	.239	.302	.308	.562	.578	.779
	Sig. (2-tailed)	.031	.110	.041	.037	.000	.000	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.7	Pearson Correlation	.379	.199	.143	.088	.273	.234	.607
	Sig. (2-tailed)	.009	.184	.343	.559	.067	.118	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.8	Pearson Correlation	.240	.381	.116	.017	.155	.324	.491
	Sig. (2-tailed)	.107	.009	.444	.912	.305	.028	.001
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.9	Pearson Correlation	.137	.155	.351	.170	.399	.128	.679
	Sig. (2-tailed)	.363	.305	.017	.259	.006	.397	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.10	Pearson Correlation	.216	.109	.129	.152	.385	.302	.615
	Sig. (2-tailed)	.150	.472	.392	.313	.008	.042	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.11	Pearson Correlation	.320	.251	.219	.233	.554	.415	.761
	Sig. (2-tailed)	.030	.093	.144	.119	.000	.004	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.12	Pearson Correlation	.085	.031	.567	.340	.371	.093	.615
	Sig. (2-tailed)	.575	.839	.000	.021	.011	.537	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46

Y1.13	Pearson Correlation	.276	.146	.139	.304	.248	.205	.415**
	Sig. (2-tailed)	.063	.333	.358	.040	.097	.173	.004
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.14	Pearson Correlation	.075	.124	.088	.085	.340	.250	.452**
	Sig. (2-tailed)	.622	.412	.561	.575	.021	.094	.002
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.15	Pearson Correlation	.213	.271	.261	.288	.343	.279	.675**
	Sig. (2-tailed)	.156	.068	.080	.052	.020	.061	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.16	Pearson Correlation	.464**	.087	.320	.295	.364	.289	.694**
	Sig. (2-tailed)	.001	.564	.030	.047	.013	.052	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.17	Pearson Correlation	.400**	.259	.071	.211	.359	.342	.313
	Sig. (2-tailed)	.006	.083	.641	.160	.014	.020	.034
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.18	Pearson Correlation	.435**	.202	.164	.220	.233	.478**	.533**
	Sig. (2-tailed)	.003	.177	.275	.141	.119	.001	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.19	Pearson Correlation	1	.335*	.116	.222	.283	.311*	.502**
	Sig. (2-tailed)		.023	.441	.139	.057	.035	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.20	Pearson Correlation	.335*	1	-.005	.194	.218	.196	.367*
	Sig. (2-tailed)	.023		.973	.197	.145	.193	.012
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.21	Pearson Correlation	.116	-.005	1	.509**	.281	.090	.517**
	Sig. (2-tailed)	.441	.973		.000	.059	.550	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.22	Pearson Correlation	.222	.194	.509**	1	.400**	.270	.468**
	Sig. (2-tailed)	.139	.197	.000		.006	.070	.001
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.23	Pearson Correlation	.283	.218	.281	.400**	1	.645**	.658**
	Sig. (2-tailed)	.057	.145	.059	.006		.000	.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Y1.24	Pearson Correlation	.311*	.196	.090	.270	.645**	1	.509**
	Sig. (2-tailed)	.035	.193	.550	.070	.000		.000
	N	46	46	46	46	46	46	46
Ytotal	Pearson Correlation	.502**	.367*	.517**	.468**	.658**	.509**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.012	.000	.001	.000	.000	
	N	46	46	46	46	46	46	46

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY
 /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7
 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
 /MODEL=ALPHA.

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.639	7

RELIABILITY
 /VARIABLES=Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5 Y1.6 Y1.7 Y1.8 Y1.9 Y1.10 Y1.11 Y1.12 Y1.13 Y1.14 Y1.15 Y1.16 Y1.17 Y1.18 Y1.19 Y1.20 Y1.21 Y1.22 Y1.23 Y1.24
 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
 /MODEL=ALPHA.

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	46	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	46	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.910	24

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		46
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.25989019
Most Extreme Differences	Absolute	.121
	Positive	.073
	Negative	-.121
Kolmogorov-Smirnov Z		.819
Asymp. Sig. (2-tailed)		.513
a. Test distribution is Normal.		

--	--

UJI REGRESI

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Y
/METHOD=ENTER X
/SCATTERPLOT=(*SRESID,*ZPRED)
/RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID).
    
```

Regression

Variables Entered/Removed^p

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Perangkat Desa ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.833	.390		4.697	.000
	Perangkat Desa	.601	.095	.688	6.295	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.7200	4.8377	4.2778	.24665	46
Std. Predicted Value	-2.262	2.270	.000	1.000	46
Standard Error of Predicted Value	.039	.097	.052	.016	46
Adjusted Predicted Value	3.6950	4.8184	4.2774	.24771	46
Residual	-.56429	.59319	.00000	.25989	46
Std. Residual	-2.147	2.257	.000	.989	46
Stud. Residual	-2.233	2.283	.001	1.009	46
Deleted Residual	-.61036	.60676	.00042	.27076	46
Stud. Deleted Residual	-2.344	2.403	.001	1.029	46
Mahal. Distance	.028	5.153	.978	1.339	46
Cook's Distance	.000	.204	.021	.033	46
Centered Leverage Value	.001	.115	.022	.030	46

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Lampiran 2

Distribusi Nilai t_{tabel}

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
61	1.296	1.671	2.000	2.390	2.659
62	1.296	1.671	1.999	2.389	2.659
63	1.296	1.670	1.999	2.389	2.658
64	1.296	1.670	1.999	2.388	2.657
65	1.296	1.670	1.998	2.388	2.657
66	1.295	1.670	1.998	2.387	2.656
67	1.295	1.670	1.998	2.387	2.655
68	1.295	1.670	1.997	2.386	2.655
69	1.295	1.669	1.997	2.386	2.654
70	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
71	1.295	1.669	1.996	2.385	2.653
72	1.295	1.669	1.996	2.384	2.652
73	1.295	1.669	1.996	2.384	2.651
74	1.295	1.668	1.995	2.383	2.651
75	1.295	1.668	1.995	2.383	2.650
76	1.294	1.668	1.995	2.382	2.649
77	1.294	1.668	1.994	2.382	2.649
78	1.294	1.668	1.994	2.381	2.648
79	1.294	1.668	1.994	2.381	2.647
80	1.294	1.667	1.993	2.380	2.647
81	1.294	1.667	1.993	2.380	2.646
82	1.294	1.667	1.993	2.379	2.645
83	1.294	1.667	1.992	2.379	2.645
84	1.294	1.667	1.992	2.378	2.644

25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	85	1.294	1.666	1.992	2.378	2.643
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	86	1.293	1.666	1.991	2.377	2.643
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	87	1.293	1.666	1.991	2.377	2.642
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	88	1.293	1.666	1.991	2.376	2.641
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	89	1.293	1.666	1.990	2.376	2.641
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	90	1.293	1.666	1.990	2.375	2.640
31	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744	91	1.293	1.665	1.990	2.374	2.639
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	92	1.293	1.665	1.989	2.374	2.639
33	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733	93	1.293	1.665	1.989	2.373	2.638
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	94	1.293	1.665	1.989	2.373	2.637
35	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	95	1.293	1.665	1.988	2.372	2.637
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	96	1.292	1.664	1.988	2.372	2.636
37	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715	97	1.292	1.664	1.988	2.371	2.635
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	98	1.292	1.664	1.987	2.371	2.635
39	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708	99	1.292	1.664	1.987	2.370	2.634
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	100	1.292	1.664	1.987	2.370	2.633
41	1.303	1.683	2.020	2.421	2.701	101	1.292	1.663	1.986	2.369	2.633
42	1.302	1.682	2.018	2.418	2.698	102	1.292	1.663	1.986	2.369	2.632
43	1.302	1.681	2.017	2.416	2.695	103	1.292	1.663	1.986	2.368	2.631
44	1.301	1.680	2.015	2.414	2.692	104	1.292	1.663	1.985	2.368	2.631
45	1.301	1.679	2.014	2.412	2.690	105	1.292	1.663	1.985	2.367	2.630
46	1.300	1.679	2.013	2.410	2.687	106	1.291	1.663	1.985	2.367	2.629
47	1.300	1.678	2.012	2.408	2.685	107	1.291	1.662	1.984	2.366	2.629
48	1.299	1.677	2.011	2.407	2.682	108	1.291	1.662	1.984	2.366	2.628
49	1.299	1.677	2.010	2.405	2.680	109	1.291	1.662	1.984	2.365	2.627
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	110	1.291	1.662	1.983	2.365	2.627
51	1.298	1.675	2.008	2.402	2.676	111	1.291	1.662	1.983	2.364	2.626
52	1.298	1.675	2.007	2.400	2.674	112	1.291	1.661	1.983	2.364	2.625

Dari "Table of Percentage Points of the t-Distribution." *Bimetrika*, Vol. 32. (1941), p. 300. Reproduced by permission of the Biometrika Trustees.

Lampiran 3

KUESIONER PENELITIAN

Pendahuluan

Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Daftar pernyataan ini dibuat dengan maksud mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Proposal yang berjudul: **Pengaruh Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sinjai)** dengan melakukan studi pada Universitas Muhammadiyah Makassar di Kota Makassar.

Identitas Responden

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Jabatan Kerja :
4. Usia :
5. Pendidikan Terakhir : SLTA/ Sederajat
: Diploma (D3)
: Strata 1 (Sarjana)
: Strata 2 (Master)
: Strata 3 (Doktor)
6. Lama Bekerja: : <1 Tahun
: 1-3 Tahun
: 4-6 Tahun
: 7-9 Tahun

Pertanyaan

Lingkarilah salah satu pilihan yang dianggap paling tepat, dengan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Perangkat Desa (X)

Yaitu bagaimana keterlibatan perangkat Desa terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tellulimpoe mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Indikator dari pengaruh perangkat Desa yaitu:

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 4. Setuju 5. Sangat Setuju		
1	perangkat desa terlibat dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa	1 2 3 4 5
2	perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan ADD	1 2 3 4 5
3	perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB Desa kepada kepala desa dan/atau BPD	1 2 3 4 5
4	perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan ADD	1 2 3 4 5
5	perangkat desa memberikan masukan terkait perubahan APB Desa	1 2 3 4 5
6	perangkat desa bersama dengan kasi, menyusun RAB, memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa, mengelola atau melaksanakan pekerjaan terkait kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang APB desa	1 2 3 4 5
7	Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan	1 2 3 4 5

2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Indikator akuntabilitas pengelolaan dana desa

A. Perencanaan

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 4. Setuju 5. Sangat Setuju		
1	Sekertaris Desa Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa	1 2 3 4 5
2	sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD	1 2 3 4 5
3	Raperdes APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk	1 2 3 4 5

	pembahasan lebih lanjut					
4	Raperdes APBDesa tersebut disepakati bersama	1	2	3	4	5
5	Raperdes APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi	1	2	3	4	5
6	Peraturan Desa yang telah dievaluasi dan ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya	1	2	3	4	5

B. Pelaksanaan

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 4. Setuju 5. Sangat Setuju						
1	bendahara menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa	1	2	3	4	5
2	Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	1	2	3	4	5
3	penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa	1	2	3	4	5
4	pengadaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya	1	2	3	4	5
5	Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa	1	2	3	4	5
6	Berdasarkan SPP yang diverifikasi Sekretaris Desa apakah Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran	1	2	3	4	5
7	pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara	1	2	3	4	5
8	bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1	2	3	4	5

C. Penatausahaan

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 4. Setuju 5. Sangat Setuju		
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh bendahara dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan	1 2 3 4 5
2	Kaur keuangan wajib membuat buku kas umum	1 2 3 4 5
3	Apakah Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa	1 2 3 4 5
4	Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa	1 2 3 4 5
5	Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan disampaikan kepada kepala Desa untuk disetujui	1 2 3 4 5

D. Pelaporan

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 4. Setuju 5. Sangat Setuju		
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat	1 ★ 2 3 4 5
2	kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	1 2 3 4 5
3	Kepala desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan	1 2 3 4 5

E. Pertanggungjawaban

1. Sangat tidak setuju 2. Tidak Setuju 3. Kurang Setuju 4. Setuju 5. Sangat Setuju		
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran	1 2 3 4 5
2	Laporan pertanggungjawaban disertai laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke Desa	1 2 3 4 5

Lampiran 4

BIOGRAFI PENULIS



Desi Harianti panggilan Desi lahir di Sinjai pada tanggal 26 November 1997 dari pasangan suami istri Bapak Asri dan Ibu Bude. Peneliti anak ke tiga dari tiga bersaudara. Peneliti bertempat tinggal di Citra Daya Permai 2 B11 No. 3 Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

Menyelesaikan pendidikan di SD 164 Lamberasa Desa Pattongko pada tahun 2009, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 4 Tellulimpoe dan lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tellulimpoe Kabupaten Sinjai yang sekarang berubah nama menjadi SMA Negeri 9 Sinjai, lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima sebagai salah satu mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akutantsansi Strata satu (S1).